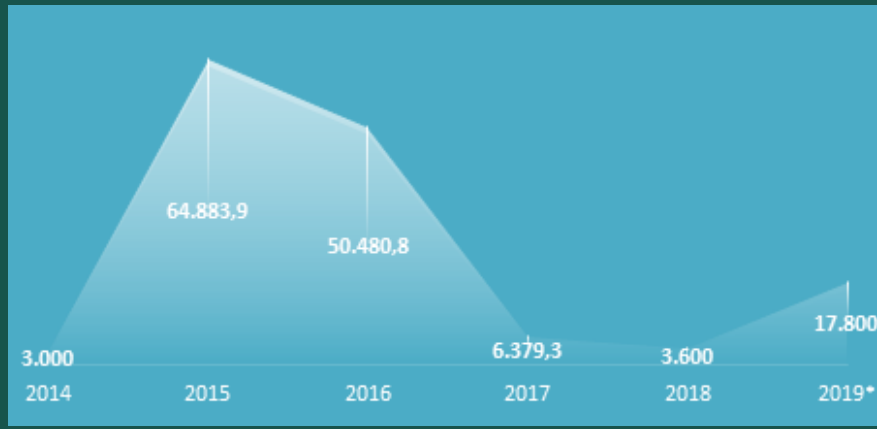


# EVALUASI PENYERTAAN MODAL NEGARA KEPADA BUMN PERIODE 2015-2019

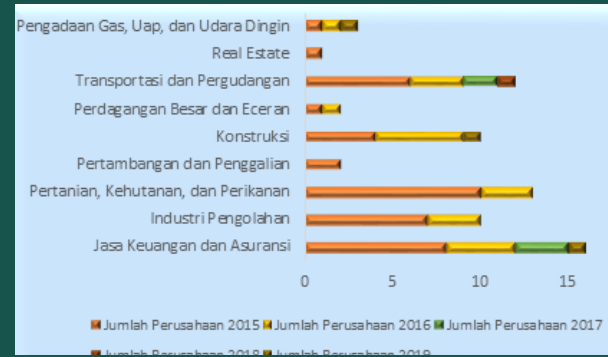


Terjadi peningkatan penyaluran PMN ke BUMN yang sangat signifikan pada tahun 2015 sebesar 2.062,8 persen dibandingkan tahun 2014. Peningkatan PMN ke BUMN ini bertujuan guna mendukung program prioritas nasional dalam mewujudkan Nawacita yang menjadi visi pemerintahan Joko Widodo periode pertama.

## A. EVALUASI TUJUAN PEMBERIAN PMN PADA BUMN PERIODE 2015-2019

Berdasarkan evaluasi tujuan penyaluran PMN pada BUMN periode 2015-2019, berikut ini yang dapat diinventarisir oleh penulis, diantaranya:

1. Pada tahun 2015, masih terdapat penyaluran PMN pada BUMN yang tidak mencantumkan tujuan dari penyaluran PMN. BUMN tersebut antara lain PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), PT Pindad (Persero), PT Industri Kapal Indonesia (Persero), PT Perikanan Nusantara (Persero), PT Pelni (Persero), dan PT Djakarta Lloyd (Persero).
2. Pada tahun 2016, masih terdapat BUMN yang tidak mencantumkan tujuan dari penyaluran PMN yaitu PT Perikanan Nusantara (persero), PT Pelni (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, dan PT Amarta Karya.
3. Pencantuman tujuan dari PMN pada BUMN secara jelas dilakukan sejak tahun 2017-2019.
4. Penggunaan PMN pada BUMN periode 2015-2019 didominasi untuk perbaikan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas BUMN guna mencapai tujuan dari PMN tersebut. Apabila dilihat dari karakteristik tujuan penyaluran PMN pada BUMN periode 2015-2019, maka masih didominasi oleh peningkatan pelayanan publik BUMN dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Sedangkan tujuan untuk peningkatan daya saing BUMN sebagaimana yang diamanahkan dalam RPJMN 2015-2019 belum dapat terlaksana dengan baik.
5. Telah terdapat keselarasan sektor yang mendapat PMN pada BUMN 2015-2019 dengan yang terdapat dalam RPJMN 2015-2019, yaitu sektor pangan, infrastruktur serta perumahan.



Terkait penyaluran PMN pada BUMN 2015-2019 yang mencakup sektor pangan, infrastruktur, dan perumahan, penyaluran dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dapat dilihat dari klasifikasi sektor BUMN yang mendapatkan PMN tersebut yang masuk ke dalam sektor pangan, infrastruktur maupun perumahan. Sedangkan yang dimaksud tidak langsung disini adalah terdapat sektor diluar ketiga sektor tersebut namun dapat mendukung keberhasilan proses bisnis di ketiga sektor itu, diantaranya sektor jasa keuangan dan asuransi, industri pengolahan, transportasi pergudangan dan perdagangan besar dan eceran sebagaimana terdapat pada di samping.

## B. EVALUASI ASPEK KEUANGAN BUMN PENERIMA PMN PERIODE 2015-2019

**Rasio Likuiditas.** Rasio likuiditas yang digunakan adalah current ratio atau gearing ratio. Melalui rasio likuiditas ini dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang jangka pendeknya. Berdasarkan tabel 2, rata-rata current ratio BUMN penerima PMN periode 2015-2019 memiliki kinerja yang baik karena berada di atas standar industri, baik untuk current ratio BUMN Non Jasa Keuangan & Asuransi maupun BUMN Jasa Keuangan & Asuransi. Current ratio untuk BUMN Jasa Keuangan & Asuransi membukukan kinerja lebih baik dibandingkan current ratio BUMN Non Jasa Keuangan & Asuransi. Pencapaian kinerja ini dipengaruhi antara lain oleh banyaknya BUMN yang menerima PMN, kinerja BUMN yang bersangkutan dan iklim industri baik yang dipengaruhi faktor eksternal maupun internal. Selama periode 2015-2019, BUMN Non Jasa Keuangan & Asuransi mendapatkan PMN lebih banyak dibandingkan BUMN Jasa Keuangan & Asuransi. Namun, jika dilihat dari kinerjanya, maka kemampuan likuiditas BUMN Jasa Keuangan & Asuransi memiliki kinerja lebih baik dibandingkan BUMN Non Jasa Keuangan & Asuransi. Penyumbang current ratio tertinggi dari BUMN Jasa Keuangan & Asuransi berasal dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), yaitu dari tahun 2015-2017, 7.828,06; 8.874,21; dan 9.340,59. Sedangkan pada BUMN Non Jasa Keuangan & Asuransi, current ratio tertinggi lebih dari 1000 dicapai hanya pada tahun 2015 oleh Perum Perikanan Indonesia sebesar 1.682,61 dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia sebesar 1.296,30 serta pada tahun 2016 oleh PT Perikanan Nusantara (Persero) sebesar 2.620. Setelah tahun 2016, tidak ada lagi BUMN Non Jasa Keuangan & Asuransi yang mampu mencapai current ratio lebih dari 500.

Tabel 2. Perkembangan Rata-Rata Rasio Likuiditas BUMN Penerima PMN Periode 2015-2019 (%)

Keterangan	Current Ratio	Standar Industri
BUMN Non Jasa Keuangan & Asuransi	209,65	200
BUMN Jasa Keuangan & Asuransi	1.809,44	100

Sumber: Laporan Keuangan BUMN pada Kementerian BUMN, diolah

**Rasio Profitabilitas.** menggunakan alat ROE, ROA, dan NPM untuk melihat kinerja dalam memperoleh profit bagi BUMN yang mendapatkan PMN dalam periode 2015-2019.

**a. Return on Equity (ROE).** Melalui ROE dapat mengukur pengembalian yang akan diterima investor. Berdasarkan tabel 3, rata-rata ROE BUMN penerima PMN selama periode 2015-2019 baik BUMN Jasa Keuangan & Asuransi maupun BUMN Non Jasa Keuangan & Asuransi membukukan kinerja ROE yang kurang sehat dibandingkan ROE standar industri. ROE BUMN Non Jasa Keuangan & Asuransi memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan ROE BUMN Jasa Keuangan & Asuransi. Rendahnya kinerja ROE BUMN Non Jasa Keuangan & Asuransi disumbang oleh buruknya ROE PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan PT Amarta Karya (Persero) pada tahun 2015 dengan nilai masing-masing sebesar -9,7 persen dan -79,8. Sedangkan pada tahun 2016, ROE PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan PT Amarta Karya (Persero) kembali membukukan kinerja yang buruk yaitu sebesar -9,7 persen dan -79,8 persen.

Tabel 3. Perkembangan Rata-Rata ROE BUMN Penerima PMN Periode 2015-2019 (%)

Keterangan	ROE	Standar Industri
BUMN Non Jasa Keuangan & Asuransi	2,06	40
BUMN Jasa Keuangan & Asuransi	6,22	

Sumber: Laporan Keuangan BUMN pada Kementerian BUMN, diolah

b. Return on Asset (ROA). ROA dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang.

Tabel 4. Perkembangan Rata-Rata ROA BUMN Penerima PMN Periode 2015-2019 (%)

Keterangan	ROA	Standar Industri
BUMN Non Jasa Keuangan & Asuransi	2,08	30
BUMN Jasa Keuangan & Asuransi	3,52	

Sumber: Laporan Keuangan BUMN pada Kementerian BUMN, diolah

Berdasarkan tabel 4, rata-rata ROA BUMN Non Jasa Keuangan & Asuransi penerima PMN periode 2015-2019 sebagaimana tertera pada tabel 4, hanya mencapai nilai 2,08 persen. Nilai ini menunjukkan kinerja keuangan yang kurang sehat karena berada jauh dari standar ROA industri sebesar 30 persen. Kinerja ROA BUMN Non Jasa Keuangan & Asuransi yang buruk disumbang oleh ROA negatif dari beberapa BUMN, antara lain PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (ROA: -1); PT PAL Indonesia (Persero) (ROA: -2,8); PT Pertani (Persero) (ROA: -9,3); PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) (ROA: -7,8); PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) (ROA: -9,5); PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ROA: -4,7); PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (ROA: -4,5); dan PT Amarta Karya (Persero) (ROA: -23,9). Kondisi ini sejalan dengan tujuan dari penyaluran PMN pada BUMN periode 2015-2019 masih didominasi oleh penyediaan layanan publik bukan untuk meningkatkan daya saing yang dapat memperbaiki kemampuan BUMN dalam menghasilkan profit.

c. Net Profit Margin (NPM). NPM dapat diinterpretasikan sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya (ukuran efisiensi) di perusahaan pada periode tertentu. Berdasarkan tabel 5, NPM BUMN Non Jasa Keuangan & Asuransi menunjukkan kinerja kurang sehat karena berada di bawah nilai standar industri. Kinerja rata-rata BUMN NnJasa Keuangan & Asuransi yang kurang sehat disumbang oleh buruknya kinerja keuangan dari PT Amarta Karya (Persero) dengan NPM sebesar -117,9 persen dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dengan NPM mencapai -13,4 persen pada tahun 2016. Sedangkan pada 2018, nilai NPM BUMN penerima PMN tunai menurun disebabkan hanya ada 1 BUMN yang menerima PMN, yaitu PT Kereta Api Indonesia. Nilai NPM PT Kereta Api Indonesia pada tahun 2018 juga berada di bawah NPM standar industri, yaitu sebesar 7,79 persen. Rendahnya NPM yang dicapai disebabkan oleh tujuan penyaluran PNM pada PT Kereta Api Indonesia tahun 2018 adalah untuk mendukung pembangunan light rapid transportation (LRT) bukan untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan profit. Sedangkan BUMN Jasa Keuangan & Asuransi menunjukkan kinerja yang sehat karena nilai NPMnya berada di atas NPM standar industri. Kinerja yang positif ini didukung oleh sehatnya kinerja NPM PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia yang nilai NPMnya selalu berada di atas 60 persen selama tahun 2015-2017. Sedangkan pada 2019, hanya satu

BUMN Jasa Keuangan & Asuransi yang mendapatkan PMN yaitu PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). Namun, nilai NPM PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) mampu mencapai lebih dari 60 persen. Banyaknya BUMN Jasa Keuangan & Asuransi yang membukukan kinerja NPM yang sehat selama kurun waktu 2015-2019 disebabkan salah satunya oleh iklim industri yang mendukung dimana pada masa pemerintahan Jokowi periode pertama menitikberatkan pembangunan infrastruktur dengan membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Dan kekurangan pembiayaan tersebut didukung oleh pembiayaan yang berasal dari BUMN Jasa Keuangan & Asuransi.

Tabel 5. Perkembangan Rata-Rata NPM BUMN Penerima PMN Periode 2015-2019 (%)

Keterangan	NPM	Standar Industri
BUMN Non Jasa Keuangan & Asuransi	6,23	20
BUMN Jasa Keuangan & Asuransi	46,24	

Sumber: Laporan Keuangan BUMN pada Kementerian BUMN, diolah

## REKOMENDASI

Berdasarkan perkembangan penyertaan PMN kepada BUMN periode 2015-2019:

1. Perlu mencantumkan kejelasan tujuan penyaluran PMN pada BUMN.
2. Harus ada perbedaan tujuan antara PMN pada BUMN yang menyediakan pelayanan publik dengan profit minded. Sehingga tolok ukur kinerjanya juga dilakukan perbedaan.
3. Perlunya perbedaan evaluasi kinerja BUMN dari aspek keuangan yang disesuaikan dengan karakteristik tiap sektor.
4. Sebaiknya ditambahkan variabel risk market dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan BUMN penerima PMN.
5. Perlunya perbedaan tolok ukur keberhasilan antara BUMN yang bertujuan menyediakan pelayanan publik dan BUMN yang berorientasi profit.
6. Tolok ukur dalam menentukan BUMN mana yang penting mendapatkan suntikan PMN dapat ditentukan dari hasil evaluasi baik dari tujuan pemberian maupun kinerja keuangannya. Oleh karena itu, variabel apa saja yang menjadi bagian dari evaluasi menjadi penting untuk senantiasa dilakukan perbaikan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas sehingga manfaat dari alokasi PMN terhadap BUMN dapat lebih optimal baik untuk pembangunan maupun terhadap APBN.